

**BAB II**  
**AURI DAN POLITIK MILITER MENJELANG REORGANISASI**  
**(1959-1962)**

Studi mengenai politik militer Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) antara 1962-1966, tentunya tidak dapat dilepaskan dari perjalanan politik militer secara umum pada masa sebelumnya. Bagaimanapun penjabaran mengenai kondisi sebelum dan sesudahnya merupakan suatu ciri khas yang memperlihatkan sejarah sebagai suatu kontinuitas. Apapun hasil suatu proses sejarah, tentunya memiliki keterkaitan dengan proses atau peristiwa pada masa sebelumnya.

Politik militer di Indonesia terus menerus dikaji karena dalam perkembangannya mengalami berbagai proses berliku, yang diwarnai berbagai konflik, intrik atau benturan antar kelompok. Konflik yang terjadi, tidak hanya bersifat benturan politik-sosial-budaya maupun kelas atau terjadi antara hubungan militer dengan sipil, melainkan juga antara pihak militer itu sendiri yang seringkali di dasarkan kepada konflik antar individu.

Untuk mengamati proses perkembangan politik militer secara kontinuitas itulah, maka penulisan tesis ini memerlukan pemetaan politik mengenai kemunculan kekuatan militer dalam suatu perubahan politik dan bagaimana pandangan militer dalam proses perkembangannya sejak awal kemerdekaan hingga proses reorganisasi militer pada tahun 1962.

## 2. 1. Sekilas Tentang AURI

Awal keberadaan AURI dimulai sejak pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada Tanggal 23 Agustus 1945 untuk memperkuat kekuatan Udara yang mengalami kekurangan pesawat terbang dan fasilitas lainnya. Dengan perubahan BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945, maka kekuatan udara berubah nama menjadi TKR Jawatan Penerbangan di bawah pimpinan Komodor Soerjadi Soerjadarma<sup>1</sup>. Dalam perkembangannya, pada tahun 1965 AURI memiliki doktrin yaitu *Swa Bhwana Phaksa* (Sayap Tanah Air), yang menegaskan bahwa fungsi AURI adalah sebagai pembina kesatuan-kesatuan udara untuk menunjang strategi pertahanan dan keamanan nasional.<sup>2</sup>

Selama masa revolusi kemerdekaan 1945-1950, AURI aktif melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Kekuatan AURI melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Pihak Belanda kemudian membalas serangan AURI dan menembak jatuh pesawat angkut VTCLA yang sedang mengemban tugas kemanusiaan. Akibatnya gugur tiga perintis TNI AU yaitu: Adisutjipto, Abdurrahman Saleh dan Adisumarmo.<sup>3</sup>

Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada tahun 1950, AURI mendapatkan beberapa komponen sistem persenjataan udara serta sarana dan fasilitas

---

<sup>1</sup> Lebih lanjut, Lihat Sutrisno, Marsekal TNI Suryadi Suryadarma, (Jakarta: Departemen P & K, 1985).

<sup>2</sup> *Doktrin AURI Swa Bhwana Phaksa*, Djakarta: Markas Besar Angkatan Udara, hal. 41

<sup>3</sup> Dinas Penerangan TNI-AU, *Perjalanan TNI Angkatan Udara dan Pengembangannya pada awal dasawarsa 80-an*, (Jakarta: 1982), hal. 18-19.

pendukungnya. Kebanyakan persenjataan tersebut, merupakan hasil serah terima dari pemerintahan Hindia-Belanda. AURI kemudian melakukan program pendidikan dan pelatihan, khususnya dibidang profesi penerbangan agar dapat mengambil alih tugas dari personil Angkatan Udara Belanda.

Pada bulan Juli 1952, AURI dilanda konflik internal. Beberapa perwira AURI yang dikoordinir Hurbertus Suyono dan Wiweko mengadakan rapat di Jakarta dan Bandung untuk membahas pendidikan dan penerbangan AURI.<sup>4</sup> Rapat yang diadakan berujung kepada kecaman terhadap kepemimpinan KSAU Suryadarma karena dianggap tidak memiliki kebijakan kepemimpinan. KSAU dinilai lebih banyak mengangkat perwira hasil didikan Jepang, ketimbang perwira didikan Belanda dalam penunjukan staf umum. Akibat kecaman tersebut, Suyono dipanggil ke Mabes AU dan diperintahkan belajar ke luar negeri. Suyono yang menganggap perintah ini sebagai hukuman membuat pengaduan kepada menteri pertahanan dan seksi pertahanan DPR, tetapi pengaduannya tidak mendapat tanggapan. Presiden Sukarno tetap mempertahankan Suryadarma sebagai KSAU. Suyono kemudian dikenakan tahanan rumah dan pada bulan Juli 1955 statusnya diubah menjadi tahanan kota.<sup>5</sup> Setelah kabinet Ali jatuh, kabinet Burhanuddin Harahap merehabilitasi Suyono dan

---

<sup>4</sup> Komodor Hubertus Suyono dikenal sebagai pejabat sementara KSAU masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), karena KSAU Suryadarma saat itu ditahan bersama presiden Sukarno. Adapun Wiweko dikenal sebagai salah seorang pembangun penerbangan nasional. Wiweko pernah diperintahkan Sukarno membeli pesawat DC-3 yang kemudian diberi nama Seulawah. Keahlian Wiweko dalam mengembangkan teknologi udara terbukti lewat rancangan pesawat ringan eksperimental RI-X dan bersama Nurtanio membuat pesawat luncur NWG-1 (*Nurtanio-Wiweko Glider*). Lihat [http://id.wikipedia.org/wiki/Wiweko\\_Soepono](http://id.wikipedia.org/wiki/Wiweko_Soepono) didownload pada 1 April 2008 pukul. 09.09 WIB.

<sup>5</sup> Markas Besar TNI-Pusat Sejarah dan Tradisi TNI *Sejarah TNI: Jilid III 1950-1959*, Jakarta: 2000, hal. 163-164.

mengangkatnya sebagai wakil KSAU. Sebelumnya, AURI tidak mengenal adanya jabatan wakil KSAU.

Pada saat pelantikan Suyono pada 14 Desember 1954, terjadilah Insiden Cililitan. Saat Perdana Menteri Burhanuddin Harahap menyampaikan pidatonya, 25 perwira AURI dan prajurit pembawa panji kehormatan AURI berteriak tidak setuju dan meninggalkan lapangan upacara. Akibatnya upacara pelantikan tersebut gagal.<sup>6</sup> Empat hari setelah insiden tersebut, Presiden Sukarno berkunjung ke Pangkalan AURI Halim untuk menenangkan suasana. Presiden berpidato di depan perwira AURI dan menegaskan bahwa AURI bukanlah milik perseorangan, tetapi AURI adalah milik Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Setelah insiden tersebut, Suryadarma mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai KSAU. Namun permintaan Suryadarma ditolak presiden. Selanjutnya masalah tersebut diselesaikan dalam pertemuan Gabungan Kepala Staf (GKS) yang memutuskan bahwa jabatan wakil KSAU dibatalkan. GKS juga memecah kabinet karena dalam pengangkatan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi psikologis para perwira yang tidak setuju serta tidak meminta pertimbangan dari KSAU.

Pada tahun 1950 hingga 1960, Pemerintah RI menghadapi Pemberontakan DI/TII, Andi Aziz, RMS serta PRRI/Permesta. Dalam berbagai aksi penumpasan pemberontakan tersebut, AURI turut aktif bersama angkatan lain melakukan aksi penumpasan. Kiprah AURI terutama sangat penting dalam penumpasan

---

<sup>6</sup> Markas Besar ABRI-Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *40 Tahun ABRI: Masa Perang Kemerdekaan, Konsolidasi awal dan masa Integrasi*, Jakarta: 1985, hal.249-250.

<sup>7</sup> *Madjalah Angkasa* edisi Januari 1956

pemberontakan PRRI/Permesta, karena pemberontakan ini merupakan satu-satunya yang memiliki kekuatan udara yang bernama Angkatan Udara Revolusioner (AUREV). Pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi juga merupakan pemberontakan yang paling berbahaya, karena mendapat dukungan dari pihak Amerika dan Inggris.<sup>8</sup>

Menjelang pertengahan April 1958, pasukan Permesta yang diperkuat bantuan pesawat dan pilot-pilot Amerika dan Taiwan membangun kekuatan Angkatan Udara Revolusioner (AUREV) di bawah pimpinan Komodor Udara Muharto, atase militer di Philipina.<sup>9</sup> Pada pertengahan April hingga Mei, kekuatan AUREV berhasil mengendalikan wilayah udara Indonesia Timur, lewat aksi pemboman terhadap Ambon, Balikpapan dan Markas AURI di Kendari. Setelah AURI berhasil mengalahkan kekuatan pasukan PRRI di Sumatera, AURI kemudian memusatkan perhatian menghadapi kekuatan AUREV. Dalam menghadapi kekuatan AUREV, AURI berhasil melakukan serangan mendadak atas pangkalan udara Manado dan menghancurkan lima pesawat AUREV. Pada pertengahan Juni, kekuatan AUREV berhasil dikalahkan. Selain itu, kekuatan AURI juga berhasil menembak pesawat AUREV yang diterbangkan Allan Pope, penerbang Amerika di atas kota Ambon.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat Audrey Kahin dan George Mc. Turnan Kahin. *Subversi Politik Luar Negeri*, Pen. RZ. Leirissa, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 2000), hal. 222. ; R.Z. Leirissa, *PRRI/Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1991), hal 217 dan 92.

<sup>9</sup> RZ Leirissa, *Ibid.*, hal. 22

<sup>10</sup> Perwira AURI yang berhasil menembak jatuh pesawat Allan Pope adalah Ignatius Dewanto. Dalam versi lain, pesawat Allan Pope ditembak jatuh oleh Angkatan Darat. Lihat Marwati Djoenod Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 281.

## 2.2 Perpolitikan Nasional Menjelang Demokrasi Terpimpin

Pada tahun 1955, pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap berhasil melangsungkan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di Indonesia. Pemilu yang melahirkan empat kekuatan besar, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI memberi suatu legitimasi atas kekuatan politik secara nyata dalam pemerintahan.<sup>11</sup> Tujuan dilangsungkannya Pemilu sebagai sarana menciptakan stabilitas politik jauh dari harapan, karena Pasca Pemilu, "Empat Besar" pemenang justru semakin terlibat dalam konflik yang menajam. Pertikaian antar elit partai yang sudah terjadi antara 1950-1955 terus berlanjut dan sulit diredam.

Pada kesempatan pidato di hadapan wakil-wakil pemuda "empat partai" tanggal 28 Oktober 1956 dan Kongres Persatuan Guru tanggal 30 Oktober 1956, presiden memberi kecaman keras terhadap pelaksanaan demokrasi liberal atau parlementer. Dalam pidatonya, presiden menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia karena mendatangkan pertikaian dan sistem tersebut harus digantikan dengan sistem yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, yakni sistem terpimpin.<sup>12</sup> Pada 21 Februari 1957, Presiden Sukarno mengumumkan konsepnya mengenai pembentukan Kabinet Gotong Royong yang menyertakan "empat besar" serta kelompok fungsional. Konsep yang menekankan persatuan antara kekuatan Nasionalis-Agama dan Komunis (Nasakom) juga dikampanyekan sebagai

---

<sup>11</sup> Lihat Herbeth Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999).

<sup>12</sup> Ir. Sukarno, "Marilah Kita Kubur Partai-Partai" dalam Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 62-66

suatu perjuangan menghadapi ancaman kekuatan Neo-Imperialisme dan Kolonialisme (Neokolim).<sup>13</sup>

Gagasan presiden mengenai strategi persatuan Nasakom, melahirkan reaksi beragam dari berbagai kelompok masyarakat. Para elit partai Islam Masyumi, Nahdlatul Ulama dan Angkatan Darat menolak gagasan presiden dan menegaskan bahwa suatu perubahan sistem perundang-undangan hanya dapat dilegalkan oleh lembaga konstituante yang sudah dibentuk. Penolakan tersebut juga didasarkan pengalaman buruk ditahun 1948, yakni percobaan kudeta kelompok komunis di Madiun. Sebaliknya PKI yang didukung PNI mendukung usulan presiden tersebut.

Menguatnya pengaruh politik Sukarno serta kecenderungan pemerintahan yang sentralistis dan Pro-Komunis, melahirkan perlawanan para perwira daerah di Sumatera dan Sulawesi. Ahmad Husein di Sumatera dan Ventje Sumual di Sulawesi, mengumumkan pengambilalihan kekuasaan dari kendali pusat dan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta). Presiden Sukarno mengumumkan darurat perang untuk seluruh wilayah Indonesia, setelah kabinet Ali menyerahkan mandat pada 13 Maret 1957. Pemberlakuan darurat perang menegaskan klaim bahwa hanya militerlah yang mampu memberi kejelasan terhadap persatuan NKRI dimasa-masa krisis nasional.

Pada saat kekuatan militer menghadapi pemberontakan daerah, para politisi partai dalam badan konstituante yang mengemban amanat membuat undang-undang

---

<sup>13</sup> Konsep Nasakom merupakan kelanjutan pemikiran Bung Karno pada tahun 1926. Lihat Ir. Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I* (Jakarta: Panitia Penerbit DBR, 1963), hal. 1-23

baru, ternyata tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hal ini terutama karena adanya tarik-menarik Piagam Jakarta, antara kelompok Islam dan nasionalis sekuler. Ketika diusulkan pilihan untuk kembali kepada UUD 45, hasilnya menemui kebuntuan. Pada 5 Juli 1959 Presiden Sukarno dengan dukungan militer dan beberapa partai mengeluarkan dekrit yang memberlakukan kembali UUD 45.<sup>14</sup>

Pada 9 Juli 1959 Sukarno mengumumkan kabinet kerja dengan menunjuk dirinya sebagai perdana menteri. AH. Nasution pada kabinet kerja menempati pos Menteri Pertahanan Keamanan dan KSAD.<sup>15</sup> Adapun kepala-kepala staf angkatan bersenjata berkedudukan sebagai anggota *ex officio* kabinet kerja. Dengan status anggota kabinet, maka para kepala staf langsung bertanggung-jawab kepada presiden dalam melaksanakan tugasnya.

Pada pidato peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1959 berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang kemudian dikenal dengan istilah Manipol, Presiden Sukarno kembali menegaskan konsepsi Demokrasi Terpimpin. Sukarno mengemukakan retorika politik semangat revolusi, keadilan sosial dan kelengkapan lembaga-lembaga negara demi revolusi yang berkelanjutan. Pada awal 1960, konsepsi

---

<sup>14</sup> Lebih lanjut Lihat Adnan Buyung Nasution. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1995).

<sup>15</sup> AH. Nasution lahir di Katanopan, Hutapungkur, Sumatera-Utara pada 3 Desember 1918. Setelah menempuh jenjang akademis AMS dan pernah menjadi guru di Sumatera, pada 1940 ia mulai tertarik pada karier militer dan bergabung menjadi anggota KNIL di Bandung. Pada masa proklamasi kemerdekaan, ia turut mendirikan organisasi BKR. Karier militernya menanjak dengan cepat, mulai dari Panglima Divisi II Priangan (1946), Panglima Divisi Siliwangi (1946-1948), Wakil Panglima Besar TNI (1948), Panglima Komando Jawa (1948-1949), KSAD (1949-1952), KSAD (1955-1962), Kepala Staf Angkatan Bersenjata (1962) Menteri Keamanan Nasional merangkap Menko Hankam (1963-1966) dan Ketua MPRS (1966-1972). Sebagai perwira ia dikenal anti komunis, puritan, taat dalam menjalankan agama dan menolak praktek korupsi. Lebih lanjut, lihat Tim Pusat Data dan Analisa Tempo. *Jenderal Tanpa Pasukan-Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A.H Nasution*, (Jakarta: PDAT & ISAI, 1998) dan <http://www.sejarah TNI.mil.id/index.php?cid=2013&page=10>.

Manipol mendapatkan kosa-kata tambahan USDEK, yang merupakan singkatan dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.<sup>16</sup>

Pada bulan Maret 1960, DPR yang menolak mengesahkan anggaran belanja pemerintah, kemudian dibubarkan Presiden Sukarno lewat sebuah dekrit. Presiden kemudian membentuk dan memilih anggota DPR Gotong Royong (DPR-GR). Dalam komposisi keanggotaan DPR-GR, PKI mendapatkan porsi keanggotaan 17 % dan tokoh PKI, Lukman ditunjuk sebagai wakil ketua. MPRS yang kemudian dibentuk Sukarno juga menempatkan ketua PKI, DN. Aidit, sebagai salah seorang wakil ketua. Dengan adanya perimbangan kekuasaan PKI dalam parlemen, seiring menguatnya pengaruh politik presiden, maka presiden memiliki alasan kuat untuk mendesak pelaksanaan ideologi Nasakom dalam pemerintahan. Apalagi dalam Pemilu 1955, PKI adalah salah-satu sari empat besar pemenang Pemilu. Doktrin Nasakom yang dikampanyekan presiden mengandung pengertian bahwa kekuatan Nasionalis-Agama dan Komunis harus bersatu dalam suatu persatuan nasional menghadapi bahaya neo-imperialisme dan kapitalisme (Neokolim).

### **2.3 Politik Militer AURI Pada Masa Suryadarma**

Sebagai salah satu kekuatan pertahanan negara, kebijakan pimpinan AURI haruslah didasarkan kepada tugasnya sebagai alat pertahanan yang menjaga keamanan, baik dari ancaman luar maupun dalam negeri. Selain daripada tugas utama

---

<sup>16</sup> Lebih lanjut lihat *Tudjuh Bahan Pokok Indoktrinasi*, (Jakarta: Departemen Penerangan, tanpa tahun)

tersebut, kebijakan AURI juga tidak lepas dari pergulatan politik yang terjadi. Insiden Cililitan misalnya, terjadi sebagai akibat campur-tangan sipil terhadap militer. Jabatan Wakil Kepala Staf AURI yang sebelumnya tidak ada, dibentuk hanya untuk memecah-belah kekuatan AURI.

Menghadapi proses perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan liberal ke terpimpin, AURI menempatkan institusinya sebagai pendukung Presiden Sukarno dengan memberikan dukungan *tanpa reserve* terhadap Dekrit 5 Juli 1959. Dukungan AURI kepada Presiden Sukarno merupakan kewajaran, karena kedudukan AURI sebagai alat pertahanan negara berada di bawah kedudukan presiden. Namun demikian, dimata presiden Sukarno, AURI merupakan sekutu potensial dalam menghadapi semakin besarnya pengaruh Nasution sejak 1959 dalam angkatan bersenjata. Keberadaan Nasution yang anti komunis, merupakan hambatan bagi presiden dalam mengkampanyekan gagasan Nasakomnya. Di sisi lain AURI membutuhkan dukungan presiden untuk memperkuat pencitraannya dalam masa demokrasi terpimpin. Bagaimanapun, AURI merupakan kekuatan kecil apabila di sandingkan kekuatan AD.

Faktor lain yang menjamin dukungan AURI terhadap Presiden Sukarno adalah konflik pribadi antara KSAU Suryadarma dan Nasution. Istri Suryadarma, Ny Utami yang aktif sebagai simpatisan Gerwani, pernah ditahan pada 1948 atas perintah Nasution sehubungan dengan dugaan keterlibatannya dalam pemberontakan

PKI Madiun.<sup>17</sup> Antara Suryadarma dan Nasution, juga seringkali berpolemik dalam suatu permasalahan, seperti dalam pemilihan formatur Kabinet Ali II ketika Suryadarma tidak memilih Nasution.<sup>18</sup> Lebih lanjut A.H Nasution menuturkan bahwa saat ia menjabat sebagai ketua Gabungan Kepala Staff (GKS), komunikasi antara dirinya dan AURI terdapat garis pemisah yang sukar dipahami, sedangkan dengan AL dan Polri terdapat hubungan yang baik. Hubungan yang tertutup tersebut semakin tampak saat Suryadarma diangkat sebagai ketua GKS.<sup>19</sup>

Kecenderungan adanya rivalitas antara AURI dengan AD kemudian berlanjut pada permasalahan konsep yang teoritis, yakni sistem pertahanan nasional. Pada bulan maret 1960, Angkatan Darat berpendirian bahwa mengingat perekonomian Indonesia masih lemah, pertahanan nasional harus didasarkan kepada perang gerilya. AH. Nasution berbicara di hadapan Dewan Perancang Nasional bahwa kekuatan laut dan udara harus dikembangkan, tetapi tidak saat itu karena baru bisa dilakukan pada sepuluh sampai duapuluh tahun ke depan. Angkatan Udara dan Angkatan Laut berpendapat suatu negara kepulauan harus mendasarkan strategi pertahanannya pada pertahanan yang bergerak di udara dan laut. Dengan demikian pembangunan kekuatan laut dan udara harus dilakukan secepatnya, tidak menunggu waktu yang lama. Perbedaan ini bukanlah sekedar debat teoritis antar pengatur strategi militer,

---

<sup>17</sup> Ny. Utami Suryadarma dikenal juga sebagai simpatisan Gerwani, ia juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Indonesia untuk Setiakawan Rakyat Asia-Afrika (OISRAA), Rektor Universitas Res Publica (1962-1965) serta Ketua gerakan Konferensi Internasional Anti Pangkalan Asing (KIAPMA). Lihat Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Kalyanamitra dan Garba Budaya, 1999), hal. 320 dan 431. Saat Utami ditangkap Nasution, kedudukan Nasution adalah Panglima Komando Jawa. Adik utami, Oetomo Ramelan yang menjadi walikota Solo pada 1965 juga merupakan kader PKI.

<sup>18</sup> A.H Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid IV (Masa Pancaroba Kedua)*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal. 5 dan 393.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 308-309

karena penerapan suatu strategi juga berdampak pada alokasi anggaran dan strategi politik militer dalam jangka panjang.<sup>20</sup>

Pada bulan Juli 1959, Suryadarma menolak komando Nasution dalam departemen pertahanan dengan alasan Angkatan Udara tidak setuju dipimpin perwira Angkatan Darat. Langkah AURI kemudian diikuti Angkatan Laut dan Kepolisian. Langkah Suryadarma menolak perintah Nasution adalah suatu upaya membatasi kewenangan departemen pertahanan.

#### **2.4 Peristiwa Aru dan Pergantian Suryadarma**

Pada tahun 1960, presiden Sukarno mulai mengkampanyekan pengembalian wilayah Irian Barat kepangkuan NKRI. Sebelumnya, setelah menempuh jalur diplomasi, pihak Belanda tetap tidak mau mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Presiden Sukarno kemudian memutuskan mengambil langkah konfrontasi dengan Belanda, yakni melakukan embargo penerbangan Belanda dan nasionalisasi beberapa perusahaan milik Belanda. Secara militer, presiden mengeluarkan Maklumat Trikora untuk merebut daerah Irian Barat.

Diantara berbagai peristiwa pada masa pembebasan Irian Barat, peristiwa yang cukup penting adalah Peristiwa Aru pada tanggal 16 Januari 1962. Dalam peristiwa tersebut, *KRI Macan Tutul* yang berencana melakukan misi infiltrasi dihadap kapal laut Belanda di Laut Aru. Walaupun operasi tersebut bersifat rahasia, tetapi pihak belanda seakan telah bersiap melakukan penyerangan. Akibatnya kapal

---

<sup>20</sup> Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 254-255

tersebut ditenggelamkan. Komodor Yos Sudarso, salah seorang deputy Men/Pangal turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Peristiwa Aru kemudian melahirkan polemik dikalangan angkatan bersenjata. AD dan AL menuduh bahwa AURI telah melakukan kelalaian karena tidak memberi perlindungan dari udara.<sup>21</sup> Menanggapi tuduhan tersebut, AURI menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya operasi infiltrasi Yos Sudarso, apalagi operasi itu sendiri bersifat rahasia. Polemik yang berkepanjangan semakin meruncing kepada tuntutan agar panglima AURI, Laksamana Suryadarma, bertanggung-jawab atas kelalaian AURI tersebut.

Pada hari Jumat, 18 Januari 1962, Presiden Sukarno mengundang Menteri/KSAU Suryadarma, Kolonel Omar Dani dan Ir. Djuanda diruang kerjanya. Presiden mendiskusikan keadaan negara pasca Peristiwa Aru dan memutuskan pencopotan jabatan Suryadarma sebagai Men/Pangau dan digantikan Omar Dani.<sup>22</sup> Walaupun secara resmi presiden menyatakan pencopotan tersebut bukan karena peristiwa Aru. Namun, karena pencopotan yang datang secara tiba-tiba pasca polemik Peristiwa Aru merupakan kebijakan presiden untuk meredakan pertengkaran dalam angkatan bersenjata.

---

<sup>21</sup> Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hal. 89

<sup>22</sup> Omar Dani lahir di Solo pada 1924. Putra KRT Reksonegoro, Asisten Wedana Gondangwinangun, Klaten. Dari garis keturunan ayahnya, ia tergolong memiliki hubungan kekerabatan dengan keraton Solo. Ia menapaki karir penerbang pada akhir 1950 di Taloa, Amerika Serikat. Tahun 1956 ia bertugas belajar di Royal Air Force Staf College di Andover, Inggris. Setelah menamatkan studi, Omar Dani ditugaskan dalam berbagai operasi militer, misalnya menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera. Lebih lanjut, Lihat Omar Dani. *Tuhan Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku*, (Jakarta: ISAI, 1999).